

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang masih terdapat banyak masalah didalamnya. Masalah terbesar yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam bidang kependudukan yaitu jumlah penduduk yang relatif masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Pertumbuhan penduduk yang pesat akan mengakibatkan pertumbuhan penduduk dan semakin besar pula usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara tersebut. Pemerintah Indonesia tentunya akan terus berupaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan berbagai cara. Salah satu cara yaitu melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kemampuan manusia untuk mengembangkan sumber daya alamnya kurang, sedangkan pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk yang semakin hari semakin meningkat mengakibatkan sumber daya alam tidak akan dapat memenuhi atau menampung pertumbuhan manusia yang semakin pesat.

Masalah kependudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini masih belum terselesaikan. Permasalahan ini diakibatkan jumlah penduduk di Indonesia yang semakin tinggi dengan angka kelahiran yang tinggi pula. Terdapat tiga aspek inti permasalahan kependudukan di Indonesia yaitu struktur umur muda, kualitas pendudukan, dan persebaran penduduk antar wilayah yang tidak merata (BKKBN, 2013:7). Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2010 sebanyak 237,6 juta jiwa, terdiri atas 119,6 juta pria dan 118 juta wanita dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49% per tahun sehingga merupakan jumlah penduduk terbesar keempat didunia setelah China, India, dan Amerika Serikat.

Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan angka kelahiran yang semakin tinggi ini dapat berdampak pada perkembangan ekonomi dan

kesejahteraan rakyat di Indonesia. Pertambahan penduduk di Indonesia umumnya bisa dikatakan 99,9% disebabkan oleh tingginya kelahiran, sisanya berupa migrasi penduduk ke Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam 1 detik di Indonesia terjadi kelahiran bayi sebanyak 1-2 jiwa (Irianto, 2014:27). Dari berbagai permasalahan kependudukan dengan angka kelahiran yang tinggi tersebut pemerintah membentuk suatu Program yakni Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Dari program tersebut pemerintah berharap dapat mengatasi berbagai permasalahan kependudukan di atas untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang bidang kesehatan maupun meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pemerintah telah berupaya untuk mengendalikan jumlah penduduk adalah melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Meskipun program KB telah dilakukan cukup lama, namun nyatanya jumlah penduduk Indonesia masih terus bertambah dan angka kelahiran masyarakat di Indonesia semakin tinggi. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yang terus meningkat seiring waktu. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil sensus penduduk yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia sudah melebihi dari perkiraan dari Badan Pusat Statistik Indonesia serta upaya pemerintah dalam pengendalian kuantitas penduduk melalui Keluarga Berencana, serta pengembangan dan peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas. (Indrayani, 2013:4)

Keluarga kecil dan berkualitas tinggi sekiranya dapat diwujudkan melalui program yang sudah digadang oleh pemerintah yaitu Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Program KKBPK ini salah satu caranya yaitu dengan menggunakan alat kontrasepsi yang dapat diperuntukkan baik wanita maupun pria. Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) merupakan salah satu program untuk mengatur jarak kelahiran yang dibuat oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) memiliki tujuan pengaturan jarak kehamilan menggunakan metode kontrasepsi dan menciptakan kesejahteraan

ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat melalui usaha-usaha perencanaan dan penjangkaran penduduk. Keluarga Berencana atau dapat disingkat KB merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia (SDM). (Hartanto, 2015: 13)

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) juga merupakan program sosial yang sangat membantu dalam upaya meningkatkan kualitas SDM rakyat Indonesia dan sekaligus berkontribusi dalam pengendalian jumlah penduduk yang semakin pesat. Dalam melaksanakan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) telah mendapat dukungan yang kuat dengan adanya komitmen nasional yaitu telah dilembagakannya program KKBPK nasional melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Dengan adanya undang-undang yang mendukung program tersebut tentunya bangsa Indonesia telah berupayah penuh dan ikut mendukung untuk memajukan keluarga kecil yang sejahtera.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah berupaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan mengenai pertumbuhan penduduk di Indonesia melalui peningkatan pelayanan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) merupakan sebuah program yang pemerintah buat, yang mana di dalam program tersebut terdapat berbagai kegiatan medis seperti pemakaian dan pelepasan alat kontrasepsi KB, berbagai penyuluhan maupun sosialisasi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, pemberian motivasi kepada masyarakat untuk mengatur jarak kelahirannya, serta terdapat juga pelayanan untuk masyarakat apabila ada yang ingin berkonsultasi mengenai masalah kesehatan. (BKKBN, 2018:10)

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) memiliki berbagai kemudahan dan fasilitas didalamnya dimaksudkan agar masyarakat tertarik untuk mengikuti program tersebut. Program ini diadakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk menahan atau mengurangi angka pertumbuhan

penduduk di Negara Indonesia dan tentunya untuk meminimalisir tingkat kelahiran penduduk di Indonesia. Pelaksanaan program Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tidak hanya semata mata digunakan untuk kepada upaya pencapaian target kuantitas penduduknya, melainkan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar lagi yaitu harus menyentuh banyak aspek terkait dengan upaya kualitas dalam rangka mewujudkan sebuah keluarga yang berkualitas dan sejahtera. (BKKBN, 2018:18)

Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan telah melakukan berbagai upaya untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program KKBPK. Untuk menunjang keberhasilan tersebut perlu adanya interaksi sosial yang baik antara PLKB dengan masyarakat sekitar. Interaksi sosial dapat mempengaruhi tindakan individu atau kelompok masyarakat tertentu. Maka dari itu, melalui suatu proses interaksi sosial PLKB dapat melakukan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan program KKBPK dan institusi masyarakat pedesaan yang ada di Kecamatan Modung sehingga ada kerjasama yang lebih baik lagi dalam pelaksanaan program KKBPK.

Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam melaksanakan program KKBPK tentunya tidak akan selalu berjalan dengan lancar. Banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Menurut Liliweri (2013:260) hambatan dalam komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi proses komunikasi sehingga menyebabkan tidak terjadinya komunikasi dengan baik. Dalam setiap proses komunikasi, baik linear, interaktif, maupun transaksional, kita selalu menemui noise (gangguan atau hambatan). Hambatan yang terjadi biasanya terdapat gangguan atau noise pada komunikasi tersebut. Banyak hal yang dapat membuat komunikasi tidak berhasil atau tidak berjalan sesuai dengan keinginan hal tersebut dapat disebabkan karena hambatan eksternal maupun internal. Maka dari itu berdasarkan kondisi yang dijelaskan, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Hambatan Komunikasi Penyuluh Lapangan**

Keluarga Berencana (PLKB) dalam Mensosialisasikan Program KKBPK pada Aseptor di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa Hambatan Komunikasi Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam Mensosialisasikan Program KKBPK pada Aseptor di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Hambatan Komunikasi Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam Mensosialisasikan Program KKBPK pada Aseptor di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan serta meningkatkan pengetahuan bagi perkembangan Ilmu Komunikasi, Khususnya persepsi Aseptor terhadap program KKBPK.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Untuk menambah wawasan tentang Hambatan Komunikasi Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam Mensosialisasikan Program KKBPK pada Aseptor di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

b. Bagi Masyarakat Umum

Sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan tentang Hambatan Komunikasi Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam Mensosialisasikan Program KKBPK pada Aseptor di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan dan termotivasi dalam program KKBPK.